CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 14 No. 2 September 2026, hal. 178-190

Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis *Civic Disposition* untuk Membentuk Karakter Disiplin Siswa dalam Kurikulum Merdeka

Idayanti[1*], Muh. Zubair[2], Maria Grace Putri Edi[3]

[1]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia, idaynti1126@gmail.com
[2]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia, zubairfkip8@gmail.com
[3]Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia, graceedi@staff.unram.ac.id

*korespondensi penulis: idaynti1126@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10-09-2026
Revised: 22-09-2026
Accepted: 25-09-2026
Published: 30-09-2026

Kata Kunci:

Civic Disposition
Karakter Disiplin
Kurikulum Merdeka
Pendidikan Pancasila

ABSTRAK

Pembentukan karakter disiplin melalui Pendidikan Pancasila memerlukan pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan kewarganegaraan dengan tanggung jawab dan perilaku nyata. Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta faktor pendukung dan penghambat pembelajaran berbasis civic disposition dalam Kurikulum Merdeka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di kelas XI Sains 2 SMA Negeri 2 Mataram, melibatkan tujuh informan yang terdiri atas satu wakil kepala sekolah, satu guru, dan lima siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan mengintegrasikan kedisiplinan melalui pembagian tanggung jawab kelompok, pengaturan waktu, pilihan produk, dan penilaian proses. Pelaksanaan mencakup pembiasaan kesiapan belajar, pengelolaan diskusi, serta pemantauan kontribusi kelompok, tetapi kepatuhan siswa masih membutuhkan pengingat guru. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan tugas, umpan balik, dan pendampingan. Penilaian proyek belum sepenuhnya memisahkan indikator kedisiplinan dari persyaratan teknis produk. Faktor pendukung meliputi kesediaan siswa menerima arahan dan pendampingan guru, sedangkan hambatan mencakup kesulitan memahami tugas, penundaan pekerjaan, ketidakteraturan diskusi, dan kontribusi kelompok yang belum merata. Penelitian menegaskan bahwa pembinaan kedisiplinan perlu membedakan kepatuhan situasional dari disiplin mandiri serta pengetahuan dari perilaku.

Keywords:

Civic Disposition
Discipline Character
Merdeka Curriculum
Pancasila Education

ABSTRACT

*Developing a disciplined character through Pancasila Education requires an approach that integrates civic knowledge with personal responsibility and tangible behavior. This study aims to analyze the planning, implementation, and evaluation—as well as the supporting and hindering factors—of instruction focused on "civic disposition" within the *Kurikulum Merdeka* (Independent Curriculum) framework. Employing a descriptive qualitative approach, the study was conducted in class XI Science 2 at SMA Negeri 2 Mataram, involving seven informants: one vice-principal, one teacher, and five students. Data were collected through passive participatory observation, semi-structured interviews, and documentation, then analyzed via data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, with triangulation applied across sources, techniques, and timeframes. The findings indicate that planning integrates discipline by assigning group responsibilities, managing time, offering choices in project outputs, and assessing the process. Implementation involves fostering readiness to learn, facilitating discussions, and monitoring group contributions; however, student compliance still requires reminders from the teacher. Evaluation is carried out through task monitoring, feedback, and guidance. Notably, project assessment has yet to fully distinguish*

This work is licensed under a *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License*. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

indicators of discipline from the technical requirements of the final product. Supporting factors include students' willingness to accept direction and guidance from the teacher, while challenges include difficulties in understanding assignments, procrastination, disorganized discussions, and uneven contributions among group members. The study underscores that fostering discipline requires distinguishing between situational compliance and self-directed discipline, as well as between knowledge and actual behavior.

Copyright © 2026 (Idayanti, et al.) All Right Reserved

How to Cite : Idayanti, I., Zubair, M., Edi, Maria Grace P. (2026). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Civic Disposition untuk Membentuk Karakter Disiplin Siswa dalam Kurikulum Merdeka. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 14 (2),* 178-190.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan dimensi fundamental dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan individu berpengetahuan, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan. Dalam konteks pendidikan Indonesia, Pendidikan Pancasila memiliki kedudukan strategis karena mengintegrasikan nilai Pancasila, prinsip konstitusional, penghormatan terhadap keberagaman, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak semata-mata diarahkan pada penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada internalisasi nilai moral melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berkesinambungan (Anderson & Sari, 2016). Salah satu dimensi karakter yang penting dikembangkan adalah kedisiplinan, yang mencerminkan kemampuan individu mengendalikan perilaku, memenuhi tanggung jawab, serta menghormati aturan dan hak orang lain. Dalam perspektif kompetensi kewarganegaraan, kedisiplinan merupakan bagian dari watak kewarganegaraan (civic disposition) yang mencakup karakter privat dan publik untuk mendukung kehidupan demokratis (Branson, 1998). Pengembangan watak kewarganegaraan melalui pembelajaran juga menekankan pentingnya pembiasaan tanggung jawab, toleransi, kepedulian, dan penghormatan terhadap norma sosial (Pangalila, 2017). Dengan demikian, keberhasilan Pendidikan Pancasila perlu ditinjau tidak hanya berdasarkan pemahaman konsep, tetapi juga berdasarkan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan karakter disiplin memperoleh perhatian dalam perkembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, khususnya melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan keterkaitan antara tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen yang mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan peserta didik (Anggraena et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, pengembangan kedisiplinan perlu diintegrasikan ke dalam aktivitas pembelajaran melalui tanggung jawab terhadap tugas, keteraturan mengikuti kegiatan, ketepatan waktu, dan penghormatan terhadap orang lain. Pembentukan karakter tidak cukup dilakukan melalui penyampaian aturan, tetapi memerlukan proses yang menghubungkan pemahaman moral dengan komitmen dan tindakan nyata. Karakter yang baik melibatkan keterpaduan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral (Lickona, 1996). Pembiasaan perilaku secara berulang juga menjadi landasan pembentukan watak, sedangkan pengamatan terhadap perilaku figur yang dianggap penting berperan dalam proses pembelajaran sosial (Aristoteles et al., 1998; Bandura, 2014). Penelitian mengenai Pendidikan Pancasila menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan berperan dalam pembentukan karakter melalui internalisasi nilai dan pengembangan perilaku bertanggung jawab (Fauziah, 2023; Permatasari & Lestari, 2024). Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada civic disposition memerlukan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mempraktikkan kedisiplinan secara konsisten, bukan sekadar memahami kewajiban secara konseptual.

Meskipun pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dalam pembelajaran, persoalan kedisiplinan peserta didik masih ditemukan dalam berbagai konteks sekolah. Perilaku seperti keterlambatan, ketidakpatuhan terhadap tata tertib, penundaan penyelesaian tugas, dan kurangnya keteraturan selama kegiatan pembelajaran menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pendidikan

karakter dan praktik keseharian peserta didik. Permasalahan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah juga menjadi perhatian penelitian sebelumnya, termasuk yang berkaitan dengan keterlambatan dan penerapan aturan sekolah (Zahra et al., 2023). Kondisi serupa ditemukan melalui observasi awal di SMA Negeri 2 Mataram pada November 2025, yang mengidentifikasi keterlambatan memasuki kelas, tugas yang tidak diselesaikan sesuai waktu, dan ketidakpatuhan terhadap tata tertib. Rekapitulasi kehadiran periode Januari–Juni 2026 menunjukkan tingkat keterlambatan yang berfluktuasi, dengan persentase terendah sebesar 6,8% pada April dan tertinggi 10,3% pada Mei. Data tersebut menunjukkan bahwa kedisiplinan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian, meskipun belum dapat menjelaskan penyebab perilaku secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelanggaran, tetapi juga menelaah bagaimana pembelajaran dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi untuk membina kedisiplinan.

Upaya mengatasi permasalahan kedisiplinan memerlukan pendekatan pembelajaran yang menempatkan karakter sebagai bagian integral dari pengalaman belajar. Dalam perspektif civic disposition, kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap martabat orang lain(Branson, 1998). Pembentukan watak kewarganegaraan perlu diwujudkan melalui aktivitas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam interaksi sosial (Pangalila, 2017). Pendekatan tersebut relevan dengan Kurikulum Merdeka yang menekankan perencanaan pembelajaran berdasarkan tujuan, penyediaan pengalaman belajar yang sesuai, serta asesmen untuk mendukung perkembangan peserta didik (Anggraena et al., 2025). Dalam praktiknya, guru dapat mengintegrasikan kedisiplinan melalui pembagian tanggung jawab kelompok, penentuan batas penyelesaian tugas, pengaturan diskusi, keteladanan, dan pemberian umpan balik. Namun, pembinaan karakter perlu membedakan kepatuhan yang muncul setelah pengingat guru dengan perilaku disiplin yang dilakukan secara mandiri. Pembedaan tersebut penting karena keberhasilan pembelajaran karakter tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan ketertiban sesaat, melainkan membutuhkan bukti mengenai konsistensi perilaku dalam berbagai situasi pembelajaran.

Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi strategi yang relevan untuk mengembangkan karakter disiplin melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Pembelajaran kewarganegaraan dilaporkan memiliki hubungan dengan perkembangan karakter disiplin siswa sekolah menengah, dengan kontribusi yang terukur dalam penelitian kuantitatif sebelumnya(Dira & Nursi, 2022). Penerapan tata tertib sekolah yang dipadukan dengan pembelajaran kewarganegaraan juga diidentifikasi sebagai pendekatan untuk membina kedisiplinan (Djoh et al., 2022). Dalam konteks praktik pedagogis, diskusi, pembiasaan, dan pemberian nasihat digunakan guru untuk membentuk karakter disiplin peserta didik (Aprilia et al., 2023). Strategi lain mencakup keteladanan, pengawasan, serta pemberian sanksi edukatif sebagai bagian dari pembinaan perilaku di sekolah (Alambana et al., 2024). Penelitian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah turut menegaskan relevansi pembelajaran kewarganegaraan dalam pengembangan tanggung jawab serta internalisasi nilai Pancasila (Arbah et al., 2025; Jitmau, 2025). Meskipun demikian, strategi tersebut perlu ditelaah berdasarkan proses pelaksanaannya karena keberadaan aturan, pembiasaan, atau pendampingan guru tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa peserta didik telah memiliki kedisiplinan yang mandiri. Oleh sebab itu, analisis mengenai hubungan antara strategi pembelajaran dan perilaku kedisiplinan perlu memperhatikan bentuk keterlibatan peserta didik, bantuan yang diberikan guru, serta keberlanjutan tindakan yang ditunjukkan.

Selain strategi pembelajaran, evaluasi merupakan komponen penting dalam pembentukan karakter disiplin. Penilaian yang berorientasi pada proses memungkinkan guru memperhatikan ketepatan waktu, keterlibatan anggota kelompok, tanggung jawab terhadap tugas, dan keteraturan interaksi selama pembelajaran. Pedoman pembelajaran dan asesmen menempatkan hubungan antara tujuan, aktivitas, dan penilaian sebagai bagian penting perencanaan pembelajaran yang koheren (Hristov et al., 2023). Namun, penilaian penguasaan materi tidak dapat secara langsung digunakan untuk menyimpulkan pembentukan karakter, karena pemahaman konseptual dan perilaku merupakan dimensi yang berbeda. Penilaian aspek afektif membutuhkan teknik dan bukti yang sesuai dengan karakteristik perilaku yang dinilai (Bernardus et al., 2019). Selain itu, keterlambatan penyelesaian tugas perlu dianalisis secara hati-hati karena dapat berkaitan dengan kesulitan memahami instruksi maupun kecenderungan menunda pekerjaan. Penundaan merupakan persoalan regulasi diri yang berkaitan dengan kegagalan

menerjemahkan niat atau rencana menjadi tindakan (Steel, 2007). Dengan demikian, pembinaan kedisiplinan membutuhkan penilaian yang mampu membedakan keterbatasan pemahaman, rendahnya keterlibatan, dan perilaku menunda, sehingga tindak lanjut pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara pembelajaran kewarganegaraan, tata tertib sekolah, strategi guru, dan pengembangan karakter disiplin. Akan tetapi, kajian yang tersedia cenderung menyoroti aspek tertentu, seperti pengaruh pembelajaran terhadap kedisiplinan, penerapan peraturan, strategi pembiasaan, atau keteladanan pendidik. Kajian mengenai internalisasi nilai Pancasila dan tanggung jawab peserta didik juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya pembelajaran kewarganegaraan bagi pembentukan karakter. Namun, berdasarkan literatur yang ditelaah, masih terbatas kajian yang mengintegrasikan analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam satu kerangka civic disposition, khususnya dengan memperhatikan perbedaan antara kepatuhan yang membutuhkan pengingat dan kedisiplinan mandiri. Selain itu, penjelasan mengenai hubungan antara kesulitan memahami tugas, kecenderungan menunda, ketimpangan kontribusi kelompok, dan strategi pendampingan guru belum menjadi fokus utama kajian terdahulu. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian kontekstual yang menelaah proses pembentukan karakter disiplin secara lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan praktik pedagogis dan faktor yang memengaruhinya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis civic disposition dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas XI Sains 2 SMA Negeri 2 Mataram pada konteks Kurikulum Merdeka. Penelitian juga mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung serta menghambat proses pembinaan kedisiplinan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian berfokus pada empat indikator, yaitu kepatuhan terhadap tata tertib, ketepatan waktu, tanggung jawab terhadap tugas, dan keteraturan mengikuti pembelajaran. Kebaruan penelitian terletak pada analisis terpadu ketiga tahapan pembelajaran dengan menempatkan disiplin sebagai dimensi civic disposition, sekaligus membedakan kepatuhan yang muncul setelah pengingat dari perilaku disiplin mandiri, penilaian pengetahuan dari penilaian perilaku, serta kesulitan memahami tugas dari kebiasaan menunda. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal atau mengukur efektivitas pembelajaran secara eksperimental, melainkan untuk memberikan pemahaman empiris mengenai proses pembinaan kedisiplinan dalam konteks kelas yang diteliti. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian pembentukan watak kewarganegaraan melalui integrasi praktik pembelajaran dan asesmen perilaku. Secara praktis, temuan diharapkan menjadi dasar bagi guru dan sekolah dalam menyempurnakan perencanaan, pendampingan, serta evaluasi karakter disiplin yang lebih terarah dan berbasis bukti.

B. METODE

1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk mengkaji pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis civic disposition dalam pembentukan karakter disiplin siswa pada konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berorientasi pada pemahaman mendalam mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembinaan kedisiplinan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami perilaku, persepsi, dan tindakan partisipan secara holistik dalam lingkungan alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data (Sugiyono, 2018).

2. Informan Penelitian

Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam fenomena penelitian. Informan berjumlah tujuh orang, terdiri atas seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang sekaligus menjabat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah (Bapak G), seorang guru Pendidikan Pancasila yang mengampu kelas XI Sains 2 (Bapak M), serta lima peserta didik yang diberi kode AS, MM, PN, VR, dan RA. Wakil

kepala sekolah berperan sebagai informan kunci untuk memberikan informasi mengenai kebijakan serta dukungan kelembagaan, sedangkan guru dan peserta didik menjadi informan utama yang menjelaskan praktik dan pengalaman pembelajaran. Pelibatan ketiga kelompok informan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif dari unsur pengelola, pelaksana, dan peserta pembelajaran. Informasi yang diperoleh digunakan untuk memahami kesesuaian antara rancangan pembelajaran, praktik yang berlangsung, dan pengalaman siswa dalam menjalankan tanggung jawab kedisiplinan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif pasif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi partisipatif pasif digunakan untuk mengamati proses pembelajaran tanpa menempatkan peneliti sebagai pelaksana kegiatan. Pengamatan diarahkan pada kesiapan siswa mengikuti pembelajaran, interaksi antara guru dan peserta didik, kepatuhan terhadap arahan, serta keteraturan selama diskusi. Teknik ini memungkinkan diperolehnya informasi mengenai perilaku yang tampak secara langsung sehingga interpretasi kedisiplinan tidak sepenuhnya bergantung pada pernyataan informan. Observasi juga digunakan untuk memperhatikan cara guru memberikan pengingat, mengelola aktivitas, dan merespons perilaku yang mengganggu kegiatan pembelajaran.

Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan mengenai perencanaan pembelajaran, pembinaan disiplin, strategi pendampingan, serta faktor pendukung dan penghambat. Pertanyaan wawancara diarahkan pada empat indikator karakter disiplin dan tahapan pembelajaran yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dengan guru digunakan untuk memahami rancangan kegiatan, pembagian tugas, pengelolaan kelas, serta pemantauan perilaku. Wawancara dengan siswa memberikan informasi mengenai pengalaman menyelesaikan tugas, menerima arahan, mengikuti diskusi, dan menghadapi kesulitan pembelajaran. Sementara itu, wawancara dengan wakil kepala sekolah digunakan untuk memperoleh perspektif kelembagaan mengenai pendampingan dan penanganan permasalahan belajar siswa.

Dokumentasi dilakukan melalui pemeriksaan modul ajar Bab 1 “Menjiwai Pancasila”, hasil asesmen diagnostik, serta rekapitulasi hasil asesmen pemahaman materi kelas XI Sains 2. Modul ajar digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pembelajaran, pengorganisasian kegiatan, pilihan produk, dan kriteria penilaian. Hasil asesmen diagnostik memberikan informasi mengenai kebutuhan serta kecenderungan belajar peserta didik, sedangkan rekapitulasi asesmen digunakan untuk memahami bukti penilaian yang tersedia. Pemeriksaan dokumen juga mempertimbangkan perbedaan antara hasil penguasaan materi dan bukti perilaku disiplin karena penilaian aspek afektif memerlukan teknik serta indikator yang sesuai(Creswell & Poth, 2016).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memusatkan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan tahapan pembelajaran, indikator kedisiplinan, dan faktor internal maupun eksternal. Data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dibaca untuk mengidentifikasi pola perilaku, bentuk pendampingan, serta kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab siswa. Selanjutnya, data disajikan secara deskriptif berdasarkan fokus penelitian agar hubungan antara rancangan pembelajaran, aktivitas kelas, dan pengalaman informan dapat dipahami secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi pola temuan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan perbedaan informasi antarsumber. Analisis membedakan kepatuhan yang terjadi setelah pengingat dengan perilaku disiplin mandiri, serta memisahkan kesulitan memahami tugas dari kecenderungan menunda pekerjaan. Pembedaan tersebut penting karena perilaku menunda dapat berkaitan dengan permasalahan regulasi diri, sedangkan keterbatasan pemahaman membutuhkan bantuan pembelajaran yang berbeda (Steel, 2007). Interpretasi selanjutnya dikaitkan dengan konsep civic disposition dan prinsip pembelajaran Kurikulum Merdeka untuk menjelaskan makna temuan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari guru, peserta didik, dan wakil kepala sekolah. Triangulasi teknik dilaksanakan melalui pemeriksaan kesesuaian antara hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi waktu dinyatakan sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan keabsahan dalam catatan penelitian, meskipun rincian waktu pemeriksaan berulang belum dijelaskan. Proses triangulasi digunakan untuk memperkuat kredibilitas interpretasi, mengidentifikasi perbedaan informasi, serta membedakan temuan yang didukung pengamatan langsung dari informasi yang hanya diperoleh melalui wawancara atau dokumen. Dengan demikian, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan bukti yang tersedia dan mempertimbangkan keterbatasan cakupan pengamatan, terutama dalam menilai kemandirian serta konsistensi perilaku disiplin peserta didik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila Berbasis Civic Disposition dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa

Pembentukan karakter disiplin melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis civic disposition di kelas XI Sains 2 SMA Negeri 2 Mataram diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan, guru Pendidikan Pancasila (Bapak M) menyusun kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran, karakteristik materi, kemampuan yang diharapkan dari peserta didik, serta bentuk aktivitas yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Perencanaan tersebut tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga memuat pengorganisasian tugas, pengaturan waktu, pembagian tanggung jawab kelompok, pendampingan, dan penilaian proses pembelajaran.

Berdasarkan analisis dokumen modul ajar Bab 1 "Menjiwai Pancasila" untuk kelas XI Fase F, guru merancang pembelajaran melalui pembagian peserta didik ke dalam empat kelompok berdasarkan subbab yang dipelajari. Aktivitas pembelajaran meliputi diskusi kelompok, presentasi, pembuatan media pembelajaran, dan proyek video. Guru menetapkan ketentuan pengerjaan serta waktu pengumpulan agar peserta didik memahami kewajiban masing-masing sejak kegiatan dimulai. Pengorganisasian tersebut memperlihatkan bahwa kedisiplinan ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran, khususnya melalui ketepatan waktu, keterlibatan anggota, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. Namun, keberadaan ketentuan tersebut dalam dokumen perencanaan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa setiap peserta didik telah melaksanakan tanggung jawab secara konsisten.

Integrasi *civic disposition* dalam perencanaan pembelajaran tercermin melalui dimensi kewargaan, kolaborasi, dan kemandirian yang tercantum dalam modul ajar. Dimensi tersebut meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, kontribusi dalam kelompok, serta tanggung jawab menyelesaikan tugas. Berdasarkan wawancara, guru menjelaskan bahwa penguatan kedisiplinan dilakukan melalui kegiatan sehari-hari, seperti mendengarkan teman ketika berbicara dan memastikan setiap anggota kelompok melaksanakan bagian pekerjaannya. Praktik yang direncanakan tersebut menunjukkan keterkaitan dengan konsep civic disposition yang menempatkan disiplin diri, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap orang lain sebagai bagian dari karakter kewarganegaraan (Branson, 1998). Aktivitas diskusi dan kerja kelompok juga menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk menghubungkan pemahaman nilai dengan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam kerangka pendidikan karakter (Lickona, 1996).

Perhatian terhadap pembentukan karakter disiplin dalam perencanaan pembelajaran juga ditemukan pada rancangan penilaian proyek video. Guru menetapkan sejumlah komponen penilaian yang mencakup kualitas substansi, kreativitas, keterlibatan anggota, aspek teknis, dan ketepatan waktu. Komponen serta bobot penilaian tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Komponen dan Bobot Penilaian Proyek Video dalam Modul Ajar

No	Komponen Penilaian	Bobot
1	Kesesuaian materi dan tema	30%

No	Komponen Penilaian	Bobot
2	Kreativitas dan alur cerita	25%
3	Keterlibatan anggota	20%
4	Kualitas teknis video dan audio	15%
5	Ketepatan waktu dan durasi video minimal tiga menit	10%
	Jumlah	**100%**

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, keterlibatan anggota memperoleh bobot penilaian sebesar 20%, sedangkan ketepatan waktu digabungkan dengan ketentuan durasi video minimal tiga menit dalam satu komponen berbobot 10%. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rancangan penilaian telah memberikan perhatian terhadap proses kerja kelompok. Namun, penggabungan ketepatan waktu dengan persyaratan teknis produk menyebabkan bobot 10% tidak dapat sepenuhnya diinterpretasikan sebagai ukuran kedisiplinan waktu. Selain itu, hasil asesmen diagnostik memperlihatkan variasi preferensi peserta didik dalam bekerja secara individu maupun kelompok. Salah satu respons menunjukkan bahwa siswa lebih memilih bekerja secara mandiri karena kontribusi anggota dalam kerja kelompok belum tentu merata. Meskipun modul menyediakan pilihan penyajian berupa salindia atau poster, dokumen yang diperiksa belum menjelaskan secara khusus bagaimana informasi diagnostik digunakan untuk menyesuaikan aktivitas bagi peserta didik yang mengalami kesulitan bekerja secara berkelompok.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kedisiplinan tidak hanya ditempatkan sebagai tuntutan perilaku, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis. Integrasi tersebut sejalan dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan keselarasan antara tujuan pembelajaran, aktivitas belajar, dan asesmen untuk mendukung perkembangan kompetensi peserta didik (Athahira et al., 2026; Waly et al., 2025). Dalam perspektif kewarganegaraan, pengorganisasian tanggung jawab dan penghormatan terhadap aturan merupakan bagian dari pengembangan watak kewarganegaraan yang mencakup disiplin diri, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap hak orang lain (Branson, 1999; Pangalila, 2017).

Meskipun demikian, temuan mengenai penilaian proyek video memperlihatkan adanya persoalan dalam operasionalisasi indikator kedisiplinan. Penggabungan ketepatan waktu dan persyaratan durasi video dalam satu komponen penilaian menyebabkan kontribusi masing-masing aspek tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan indikator karakter dalam dokumen pembelajaran belum menjamin ketepatan pengukurannya. Penilaian ranah afektif memerlukan indikator yang spesifik dan bukti perilaku yang relevan agar hasilnya dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan karakter peserta didik (Hulkin, 2024). Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran berbasis civic disposition perlu membedakan kualitas produk akademik dari tanggung jawab individual, keterlibatan kelompok, dan ketepatan waktu. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa integrasi pendidikan karakter membutuhkan keselarasan antara tujuan, aktivitas, serta indikator penilaian yang benar-benar merepresentasikan perilaku disiplin.

2. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Pembiasaan Karakter Disiplin

Pembentukan karakter disiplin pada tahap pelaksanaan dilakukan melalui pembiasaan kesiapan belajar, pengelolaan waktu, pemantauan tanggung jawab tugas, dan pengaturan interaksi selama pembelajaran. Guru Pendidikan Pancasila secara aktif memberikan arahan agar peserta didik menyiapkan buku dan tugas ketika pembelajaran dimulai. Apabila terdapat siswa yang masih berbicara atau belum mengikuti arahan, guru memberikan pengingat secara langsung dan mendekati peserta didik yang tetap mengganggu kegiatan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan menghubungkan aturan kelas dengan kepentingan bersama, terutama hak peserta didik lain untuk mengikuti pembelajaran dalam suasana yang kondusif. Berdasarkan wawancara, Bapak M menegaskan pentingnya menghormati hak belajar peserta didik lain melalui pernyataan bahwa “teman-temannya punya hak untuk belajar dengan tenang”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aturan kelas tidak hanya digunakan untuk mengendalikan perilaku, tetapi juga dijelaskan berdasarkan tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap orang lain.

Hasil observasi pada 21 September 2026 menunjukkan bahwa sebagian siswa masih berbicara dan belum mempersiapkan kegiatan belajar ketika guru menyampaikan arahan awal. Temuan tersebut diperkuat oleh wawancara dengan peserta didik berkode AS yang menyampaikan bahwa dirinya berhenti berbicara setelah memperoleh pengingat guru. Namun, AS juga menjelaskan bahwa kondisi kelas yang semula tenang terkadang kembali ramai. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembiasaan disiplin telah dilaksanakan melalui pengaturan dan pengingat, tetapi perilaku tertib belum sepenuhnya berlangsung tanpa intervensi guru. Oleh karena itu, kepatuhan yang muncul sesudah pengingat perlu dibedakan dari kedisiplinan mandiri yang dilakukan secara konsisten atas kesadaran pribadi. Pembinaan ketepatan waktu dilaksanakan melalui pemberian batas pengerjaan tugas, pengingat waktu, dan penelusuran terhadap penyebab keterlambatan. Berdasarkan wawancara, peserta didik berkode MM menjelaskan bahwa kelompoknya memperoleh pengingat ketika waktu pengerjaan hampir berakhir. Akan tetapi, tugas terkadang belum dapat diselesaikan karena anggota kelompok belum memahami pertanyaan yang diberikan sehingga membutuhkan penjelasan tambahan dari guru. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlambatan penyelesaian tugas tidak selalu mencerminkan keengganan menjalankan kewajiban, tetapi dapat berkaitan dengan kesulitan memahami materi atau instruksi pekerjaan.

Pembinaan tanggung jawab dilakukan melalui pemantauan kontribusi setiap anggota kelompok. Guru menjelaskan bahwa selama kegiatan kelompok berlangsung, ia berkeliling untuk menanyakan bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing siswa. Apabila terdapat anggota yang belum berkontribusi, guru meminta kelompok melakukan pembagian ulang pekerjaan. Keterangan tersebut didukung oleh wawancara dengan AS yang menjelaskan bahwa pekerjaan dalam kelompoknya sempat lebih banyak diselesaikan oleh anggota tertentu sebelum dilakukan pengaturan kembali. Temuan ini menunjukkan bahwa kerja kelompok menyediakan kesempatan mengembangkan tanggung jawab, tetapi partisipasi yang merata masih memerlukan pendampingan. Dalam kegiatan diskusi, guru mengarahkan peserta didik untuk menghargai giliran berbicara dan mendengarkan pendapat sebelum memberikan tanggapan. Hasil observasi mencatat adanya peserta didik yang berbicara secara bersamaan dan memotong pembicaraan sehingga guru memberikan pengingat untuk menjaga keteraturan diskusi. Peserta didik berkode MM juga menyampaikan bahwa pembahasan menjadi sulit diikuti ketika beberapa siswa berbicara secara bersamaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan kedisiplinan melalui interaksi kelas berkaitan dengan pengendalian diri, penghormatan terhadap orang lain, dan tanggung jawab terhadap proses belajar bersama.

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan nilai kewarganegaraan dalam situasi nyata. Pengaitan aturan kelas dengan hak peserta didik lain untuk memperoleh lingkungan belajar yang kondusif menunjukkan bahwa kedisiplinan diarahkan pada pemahaman tanggung jawab sosial, bukan sekadar kepatuhan administratif. Perspektif ini konsisten dengan konsep civic disposition yang menempatkan pengendalian diri dan penghormatan terhadap orang lain sebagai karakter penting warga negara (Pangalila et al., 2020). Pembelajaran kewarganegaraan juga berperan dalam mengembangkan karakter melalui pembiasaan dan internalisasi nilai yang diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari (B.-Y. Sim & Low, 2012; Muhkam & Abdulkarim, 2025). Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa keteraturan perilaku peserta didik masih bergantung pada pengingat dan arahan guru. Sebagian siswa menghentikan perilaku yang mengganggu setelah memperoleh teguran, tetapi kondisi kelas terkadang kembali tidak kondusif.

Temuan ini menunjukkan pentingnya membedakan kepatuhan situasional dengan karakter disiplin yang telah terinternalisasi. Pembentukan karakter melibatkan keterkaitan antara pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral yang diwujudkan secara konsisten(Lickona, 1996). Sementara itu, pembiasaan berulang merupakan bagian penting pembentukan watak, sedangkan keteladanan pendidik menyediakan contoh perilaku yang dapat dipelajari peserta didik (Bandura, 2002; Galston, 2009). Penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi diskusi, pembiasaan, nasihat, pengawasan, dan keteladanan sebagai strategi penguatan kedisiplinan (Ananda et al., 2026; Sakban et al., 2025; Subiarto & Wakhudin, 2021). Berbeda dari kajian yang terutama mengidentifikasi strategi pembinaan, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberadaan strategi tersebut belum cukup untuk menyimpulkan

terbentuknya kemandirian disiplin. Konsistensi perilaku tanpa pengingat merupakan aspek yang masih membutuhkan pengamatan lebih lanjut.

3. Evaluasi Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pembinaan Karakter Disiplin

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis *civic disposition* dilakukan melalui pemantauan penyelesaian tugas, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan atau belum menjalankan tanggung jawabnya. Berdasarkan wawancara, guru menggunakan daftar pengumpulan tugas serta membuat catatan singkat mengenai peserta didik yang beberapa kali belum menyelesaikan pekerjaan atau belum berkontribusi dalam kelompok. Namun, daftar pengumpulan dan catatan pemantauan tersebut belum diperiksa secara langsung oleh peneliti sehingga keberadaan serta penggunaannya terutama didasarkan pada keterangan guru. Umpan balik diberikan ketika peserta didik menunjukkan perilaku yang mengganggu kegiatan diskusi maupun ketika ditemukan kekurangan pada hasil pekerjaan. Peserta didik berkode PN menjelaskan bahwa guru menunjukkan bagian jawaban yang belum lengkap sehingga dirinya dapat memperbaiki tugas tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya praktik evaluasi formatif, yaitu pemanfaatan informasi hasil pembelajaran untuk membantu peserta didik memperbaiki pekerjaannya. Praktik tersebut sesuai dengan prinsip asesmen yang menghubungkan informasi hasil belajar dengan tindak lanjut pembelajaran.

Tindak lanjut terhadap keterlambatan pengumpulan tugas dilakukan dengan menelusuri penyebab permasalahan sebelum memberikan arahan. Peserta didik berkode VR menjelaskan bahwa ketika belum memahami tugas, guru memberikan penjelasan ulang dan meminta tugas diselesaikan berdasarkan waktu yang telah disepakati. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa guru berupaya membedakan kebutuhan bantuan akademik dengan pembinaan tanggung jawab. Dengan demikian, keterlambatan tidak secara otomatis dimaknai sebagai rendahnya kedisiplinan. Hasil pemeriksaan dokumen asesmen pemahaman materi menunjukkan bahwa data yang tersedia mencakup skor dan waktu pengiriman jawaban. Namun, skor mencerminkan hasil pengerjaan soal, sedangkan kedisiplinan waktu memerlukan perbandingan antara waktu pengiriman dan batas pengumpulan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dokumen asesmen tersebut belum cukup untuk menyimpulkan tingkat kedisiplinan secara menyeluruh. Pembedaan tersebut penting karena penilaian karakter atau ranah afektif memerlukan indikator serta bukti perilaku yang sesuai dengan konstruk yang dinilai (Bernardus et al., 2019).

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pemantauan penyelesaian tugas, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut terhadap kesulitan peserta didik. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi tidak hanya digunakan untuk menentukan capaian akademik, tetapi juga sebagai sarana mendampingi perkembangan tanggung jawab siswa. Pemberian kesempatan memperbaiki pekerjaan dan penjelasan tambahan terhadap tugas yang belum dipahami mencerminkan fungsi formatif asesmen, yaitu menggunakan informasi hasil pembelajaran untuk menentukan bantuan yang diperlukan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembelajaran dan asesmen yang menekankan penggunaan informasi evaluasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar (Lockyer et al., 2017).

4. Faktor Internal dan Eksternal dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa

Pembentukan karakter disiplin dipengaruhi oleh faktor internal peserta didik dan faktor eksternal yang berkaitan dengan pembelajaran serta lingkungan sosial. Faktor internal yang mendukung meliputi kesediaan menerima arahan, mengikuti koreksi guru, dan melanjutkan tanggung jawab setelah memperoleh pendampingan. Kondisi tersebut ditemukan dalam keterangan peserta didik berkode AS, PN, dan VR. Dokumen asesmen diagnostik juga menunjukkan adanya motivasi belajar berupa keinginan memahami materi dan mencapai cita-cita, meskipun data tersebut belum membuktikan konsistensi motivasi dalam tindakan sehari-hari. Faktor internal yang menghambat meliputi kesulitan memahami tugas dan kecenderungan menunda pengerjaan. MM dan VR menyampaikan bahwa beberapa tugas tidak selesai tepat waktu karena mereka belum memahami instruksi, sedangkan RA menjelaskan bahwa dirinya mengetahui batas pengumpulan tetapi sering baru mulai mengerjakan ketika waktu hampir berakhir. Hasil wawancara dengan guru menunjukkan adanya respons pembinaan

yang berbeda, yaitu memberikan penjelasan tambahan kepada siswa yang belum memahami tugas dan pengingat tanggung jawab kepada siswa yang memahami tugas tetapi menunda pengerjaannya.

Faktor eksternal yang mendukung terutama berupa pendampingan guru melalui arahan, pengingat, penjelasan tambahan, pemantauan kelompok, dan pemeriksaan pekerjaan. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum (Bapak G) menjelaskan adanya koordinasi dengan guru ketika ditemukan kesulitan belajar atau tugas yang belum terselesaikan. Dokumen asesmen diagnostik juga memuat informasi mengenai dukungan keluarga, tetapi penelitian belum memperoleh bukti yang memadai untuk menjelaskan keteraturan atau bentuk konkret kerja sama sekolah dan keluarga. Sebaliknya, faktor eksternal yang menghambat mencakup kondisi diskusi yang kurang kondusif, pembicaraan yang saling memotong, dan ketimpangan kontribusi dalam kelompok. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian produk kelompok belum tentu mencerminkan keterlibatan seluruh anggota secara merata. Dengan demikian, pemantauan proses diperlukan agar tanggung jawab tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhir pekerjaan. Ringkasan faktor internal dan eksternal disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Ringkasan Faktor Internal dan Eksternal

Faktor	Pendukung	Penghambat
Internal	Kesediaan mengikuti arahan, menerima koreksi, dan melanjutkan kewajiban; dorongan belajar	Kesulitan memahami tugas; kebiasaan menunda pengerjaan
Eksternal	Pendampingan guru; koordinasi sekolah; dukungan belajar keluarga	Keramaian dan pembicaraan saling memotong; kontribusi kelompok belum merata

Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis *civic disposition* menyediakan kesempatan untuk membina karakter disiplin melalui perencanaan yang terstruktur, pembiasaan dalam kegiatan belajar, serta evaluasi dan tindak lanjut. Akan tetapi, pembentukan kedisiplinan masih membutuhkan pengingat dan pendampingan guru. Oleh karena itu, bukti yang tersedia belum memungkinkan penarikan kesimpulan bahwa seluruh peserta didik telah memiliki karakter disiplin yang mandiri dan konsisten. Temuan ini memperlihatkan pentingnya membedakan kepatuhan situasional dengan internalisasi karakter, sekaligus menegaskan perlunya penilaian proses yang lebih spesifik terhadap tanggung jawab, ketepatan waktu, dan keterlibatan peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Kesediaan menerima arahan, memperbaiki pekerjaan, dan melanjutkan tanggung jawab merupakan faktor internal yang mendukung pembinaan kedisiplinan. Sebaliknya, kesulitan memahami tugas dan kecenderungan menunda pengerjaan menjadi hambatan yang memerlukan respons pedagogis berbeda. Pembedaan ini penting karena keterlambatan menyelesaikan pekerjaan tidak selalu mencerminkan rendahnya tanggung jawab. Penundaan dapat berkaitan dengan permasalahan regulasi diri, khususnya kesenjangan antara niat dan tindakan, sedangkan kesulitan memahami instruksi menunjukkan kebutuhan terhadap bantuan akademik.

Pada aspek eksternal, pendampingan guru menjadi faktor pendukung utama melalui pemberian instruksi, pengingat, pemantauan kontribusi kelompok, dan umpan balik. Sebaliknya, keramaian diskusi serta ketimpangan pembagian pekerjaan menunjukkan bahwa interaksi kelompok belum selalu mendukung keteraturan dan tanggung jawab individual. Temuan ini melengkapi penelitian yang menekankan peran guru dalam pembinaan kedisiplinan melalui pengawasan dan keteladanan (Rozikin et al., 2023). Selain itu, penggunaan pembelajaran kooperatif perlu disertai pembagian peran yang jelas agar setiap anggota memperoleh kesempatan mengembangkan tanggung jawab dan penghormatan terhadap orang lain (Lestari & Mahrus, 2025). Penelitian ini memperlihatkan bahwa dukungan guru perlu disesuaikan dengan sumber permasalahan peserta didik. Siswa yang belum memahami tugas memerlukan penjelasan tambahan, sedangkan siswa yang cenderung menunda membutuhkan pendampingan dalam mengelola waktu dan memulai pekerjaan. Respons yang berbeda tersebut berpotensi menghasilkan pembinaan karakter yang lebih proporsional dan sesuai kebutuhan belajar.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian pembentukan karakter disiplin dengan menempatkannya sebagai dimensi civic disposition yang dapat ditelusuri melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Penelitian terdahulu telah menjelaskan hubungan antara

pembelajaran kewarganegaraan, penerapan tata tertib, dan strategi guru dalam pembentukan kedisiplinan(Komalasari et al., 2025). Penelitian ini menambahkan perspektif bahwa karakter disiplin perlu dianalisis berdasarkan tingkat kemandirian perilaku, kesesuaian indikator penilaian, serta perbedaan antara hambatan pemahaman dan kecenderungan menunda. Dengan demikian, kontribusinya bukan pada pembuktian efektivitas suatu model, melainkan pada penguatan kerangka analitis untuk memahami proses pembinaan kedisiplinan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Secara praktis, temuan mengindikasikan perlunya penyusunan indikator penilaian disiplin yang lebih spesifik, pemantauan kontribusi individual dalam kerja kelompok, serta pendampingan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Namun, penelitian memiliki keterbatasan karena dilaksanakan pada satu kelas dengan periode pengumpulan data yang relatif singkat. Observasi tidak mencakup seluruh proses pengerjaan dan pemeriksaan tugas, sedangkan beberapa informasi mengenai pemantauan kedisiplinan hanya diperoleh melalui wawancara. Catatan pengumpulan tugas dan hasil penilaian proyek juga belum tersedia untuk diverifikasi secara langsung. Oleh karena itu, temuan tidak dapat digunakan untuk memastikan keberlanjutan karakter disiplin secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan pengamatan berulang, pemeriksaan dokumen perilaku, dan kajian pada konteks sekolah yang berbeda untuk memperkuat pemahaman mengenai proses internalisasi kedisiplinan sebagai bagian dari pembentukan watak kewarganegaraan.

D. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila berbasis *civic disposition* di kelas XI Sains 2 SMA Negeri 2 Mataram membina karakter disiplin melalui keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan mengintegrasikan nilai kedisiplinan melalui pembagian tanggung jawab, pengaturan waktu, dan penilaian proses, sedangkan pelaksanaannya diwujudkan melalui pembiasaan kesiapan belajar, pengelolaan diskusi, serta pemantauan kontribusi kelompok. Evaluasi dilakukan melalui pemberian umpan balik dan pendampingan berdasarkan kesulitan yang dihadapi peserta didik. Meskipun demikian, kepatuhan siswa masih memerlukan pengingat guru sehingga pembentukan kedisiplinan yang mandiri dan konsisten belum dapat dipastikan. Temuan penting penelitian memperlihatkan bahwa kesulitan memahami tugas perlu dibedakan dari kecenderungan menunda pekerjaan, sedangkan penilaian penguasaan materi tidak dapat langsung digunakan sebagai indikator kedisiplinan. Faktor pendukung utama mencakup kesediaan siswa menerima arahan dan pendampingan guru, sementara hambatannya meliputi penundaan tugas, ketidakteraturan diskusi, dan ketimpangan kontribusi kelompok. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian civic disposition dengan menegaskan pentingnya membedakan kepatuhan situasional dari disiplin mandiri serta menghubungkan pembinaan karakter dengan kualitas asesmen perilaku. Secara praktis, guru perlu mengembangkan indikator penilaian kedisiplinan yang terpisah dari kualitas produk akademik, memantau kontribusi individual, dan menyesuaikan pendampingan berdasarkan kebutuhan siswa. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan observasi longitudinal, pemeriksaan dokumen perilaku, dan kajian multisitus untuk memahami konsistensi serta keberlanjutan internalisasi karakter disiplin dalam konteks pendidikan yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada stakeholder pada SMA Negeri 2 Mataram, yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru Pendidikan Pancasila, dan siswa kelas XI Sains 2 yang bersedia menjadi informan penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram atas dukungan selama penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

Alambana, B. M., Mustari, M., & Hadi, M. S. (2024). Peran Guru PPKn dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa di SMAN 06 Mataram. *JOURNAL OF CIVIC EDUCATION Учредители: Universitas Negeri Padang*, *7*(2), 74–80. https://doi.org/10.24036/jce.v7i2.1109

Ananda, F., Supriyanto, T., & Murtini, T. (2026). Reinforcement of character education: Developing learning discipline through habituation in elementary schools. *Jurnal Penelitian Pendidikan*

Indonesia, *12*(1), 604–614. https://citevra.org/article/view/2942

Anderson, I., & Sari, R. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, *1*(2), 251–274. https://doi.org/10.22437/gentala.v1i2.7116

Anggraena, Y., Ginanto, D. E., Kesuma, A. T., & Setiyowati, D. (2025). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah Edisi Revisi Tahun 2025* (pp. 1–159). Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). https://kurikulum.kemdikbud.go.id/

Aprilia, D., Rusnaini, R., & Yuliandari, E. (2023). Strategi Guru PPKn dalam Membentuk Karakter Disiplin pada Peserta Didik SMA N 2 Karanganyar. *Jurnal PPKn: Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *11*(1), 20–36. https://doi.org/10.2019/jppkn.v11i1.230

Arbah, A., Salfadilah, F., Nengtiyas, R. A., & Septyana, Y. (2025). Peran pembelajaran PPKn dalam membentuk disiplin siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegara Indonesia*, *2*(4), 45–55. https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i4.867

Aristoteles, Ross, W. D., Ackrill, J. L., & Urmson, J. O. (1998). *The nicomachean ethics* (Vol. 2). Oxford University Press Oxford.

Athahira, L., Afandi, M., & Kusumadewi, R. F. (2026). Analysis of independent curriculum implementation for improving learning quality in elementary education. *International Journal of Education and Learning Studies*, *2*(2), 108–121. https://doi.org/10.64421/ijels.v2i2.86

B.-Y. Sim, J., & Low, E. L. (2012). Character and citizenship education: Conversations between personal and societal values. *Asia Pacific Journal of Education*, *32*(4), 381–394. https://doi.org/10.1080/02188791.2012.746214

Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. *Journal of Moral Education*, *31*(2), 101–119. https://doi.org/10.1080/0305724022014322

Bandura, A. (2014). Social cognitive theory of moral thought and action. In *Handbook of moral behavior and development* (pp. 45–103). Psychology press. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=88f4a94e385718f20c72d498f9198fd8c17d3fff

Bernardus, B., Mashudi, M., & Mering, A. (2019). Penilaian ranah afektif pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas V SDN 06 Tae Tukong. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, *8*(3). https://doi.org/10.26418/jppk.v8i3.31963

Branson, M. S. (1998). *The Role of Civic Education: Center for Civic Education*. The Communitarian Network. https://civiced.org/papers/articles_role.html

Branson, M. S. (1999). Belajar civic education dari Amerika. In *Yogyakarta: LKiS*.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.

Dira, R., & Nursi, M. (2022). Pengaruh Pembelajaran Ppkn Terhadap Pengembangan Karakter Disiplin Siswa SMA Negeri 9 Padang. *Jurnal Genta Mulia*, *13*(2), 285–299. https://doi.org/10.61290/gm.v13i2.137

Djoh, A. J. M. U., Suastika, I. N., & Landrawan, I. W. (2022). Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Penerapan Tata Tertib Sekolah dan Pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Waingapu. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(1), 39–48. https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v4i1.1519

Fauziah, A. Z. (2023). Implementasi pembelajaran PKN dalam pembentukan karakter siswa sekolah dasar. *Edukasi Tematik: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, *4*(1), 19–24. https://doi.org/10.59632/edukasitematik.v4i1.241

Galston, M. (2009). Realism and idealism in Avicenna's political philosophy. *The Review of Politics*, *41*(4), 561–577. https://doi.org/DOI: 10.1017/S0034670500029193

Hristov, S., Nakov, D., & Miočinović, J. (2023). Constructive alignment between objectives, teaching and learning activities, student competencies and assessment methods in higher education. *Journal of Agriculture and Plant Sciences*, *21*(2), 21–36. https://doi.org/10.46763/JAPS23212021h

Hulkin, M. (2024). Character-Based Affective Assessment Concept in Modern Learning in Elementary School. *Jurnal PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, *8*(6), 577–583. https://doi.org/10.33578/pjr.v8i6.9805

Jitmau, F. B. (2025). *Hubungan Peran Guru PPKn Terhadap Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Melalui Internalisasi Nilai Pancasila di SMP Negeri 1 Ayamaru Utara*. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. http://eprints.unimudasorong.ac.id/id/eprint/898

Komalasari, K., Abdulkarim, A., Sopianingsih, P., & Permana, G. R. (2025). Deep Learning Model in Pancasila Education for Strengthening Students' Digital Citizenship Competences. *New Educational Review*, *81*(3), 135–150. https://doi.org/10.15804/tner.2025.81.3.09

Lestari, P., & Mahrus, M. (2025). Peran guru dalam pendidikan karakter untuk membentuk tanggung jawab dan disiplin siswa sekolah dasar. *Journal of Nusantara Education*, *4*(2), 32–45. https://doi.org/10.57176/jn.v4i2.137

Lickona, T. (1996). Eleven principles of effective character education. *Journal of Moral Education*, *25*(1), 93–100. https://doi.org/10.1080/0305724960250110

Lockyer, J., Carraccio, C., Chan, M.-K., Hart, D., Smee, S., Touchie, C., Holmboe, E. S., Frank, J. R., & Collaborators, I. (2017). Core principles of assessment in competency-based medical education. *Medical Teacher*, *39*(6), 609–616. https://doi.org/10.1080/0142159X.2017.1315082

Muhkam, M. F., & Abdulkarim, A. (2025). Civic Education Curriculum Model in Elementary Schools in Internalizing National Values and Characters. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *5*(2), 491–499. https://doi.org/10.58737/jpled.v5i2.463

Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *7*(1), 91–103. https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3553

Pangalila, T., Tuerah, J., & Umar, M. (2020). Character formation through civic education learning process. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, *24*(2). https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200529

Permatasari, B. D., & Lestari, R. Y. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Disiplin dan Tanggung Jawab Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, *8*(2), 292–305. https://doi.org/10.31597/ccj.v8i2.1024

Rozikin, M. Z., Ghozali, S., & Darmawan, D. (2023). Teacher Adaptation and the Role of Educational Institutions to Foster Learner Discipline and Participation in the Classroom. *Journal of Social Science Studies*, *3*(1), 199–212. https://jos3journals.id/index.php/jos3/article/view/234

Sakban, A., Budimansyah, D., & Darmawan, C. (2025). Integration of anti-corruption education with the nation's personality to foster anti-corruption attitudes. *Multidisciplinary Science Journal*, *7*(12). https://doi.org/10.31893/multiscience.2025587

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, *133*(1), 65. https://doi.org/1037/0033-2909.133.1.65

Subiarto, S., & Wakhudin, W. (2021). The role of teachers in improving the discipline character of students. *Dinamika Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *13*(2), 71–75. https://doi.org/10.30595/dinamika.v13i2.11552

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.

Waly, R., Asmi, N., Abdullah, R., & Syafriadi, S. (2025). Evaluation of the independent curriculum policy: A literature review on theoretical foundations and implementation practices. *Journal of English Language and Education*, *10*(4), 1561–1569. https://doi.org/10.31004/jele.v10i4.1274

Zahra, M. I., Hutagalung, F., Rusnita, A. N., Saragih, T. J. R., Parhusip, F. A., & Tarigan, P. J. B. (2023). Efektivitas Perubahan Jam Sekolah terhadap Tingkat Kedisiplinan Siswa. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, *3*(2), 42–52. https://doi.org/10.51178/jpspr.v3i2.1336